

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Willa Putri Malinda Buchori
Universitas Negeri Yogyakarta
willaputri@uny.ac.id

ABSTRACT. *The purpose of this study is to dissect the relationship between human resource capabilities and the utilization of information technology with quality financial reports at the local government level. By distributing questionnaires to BPKD and SKPD employees in Ciamis District, 113 people participated in this study. Employees who are responsible for managing finances are the sample criteria. IBM SPSS Statistics version 25 is the tool used for data processing. The results of this exploration reflect that HR capabilities and IT utilization can affect the quality of financial reports at the local government level.*

Keywords: *competence, quality of financial statement, information technology.*

ABSTRAK. Tujuan kajian ini adalah untuk membedah keterkaitan antara kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan laporan keuangan yang berkualitas di tingkat pemerintah daerah. Melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai BPKD dan SKPD di Kabupaten Ciamis, penelitian ini diikuti oleh 113 orang. Karyawan yang bertanggung jawab mengelola keuangan menjadi kriteria sampel. IBM SPSS Statistics versi 25 menjadi alat yang digunakan untuk pemrosesan data. Hasil dari eksplorasi ini mencerminkan bahwa kemampuan SDM dan pemanfaatan TI dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kompetensi, kualitas laporan keuangan, teknologi informasi.

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah berkewajiban menyusun laporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan kegiatan yang krusial karena berdampak pada keputusan yang akan ditempuh oleh pihak internal maupun eksternal. Berlandaskan pada Suwarjono (2014), pentingnya nilai pada informasi

keuangan agar memberikan kebermanfaatan bagi pembaca atau pemakainya. Informasi keuangan yang bermanfaat berarti informasi tersebut mampu mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan *stakeholder*. Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan informasi yang bermakna. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik akan membuahkan penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kualitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) guna menstimulus kualitas pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan. Kriteria kualitas laporan keuangan terdiri atas relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71, 2010). Laporan keuangan dikatakan relevan jika mampu memberikan informasi mengenai prediksi atau hasil di masa mendatang (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Menurut Karsana & Suaryana (2019), laporan keuangan dianggap andal jika diperlihatkan secara jujur, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi validitasnya. Laporan keuangan harus disajikan secara keseluruhan agar dapat diandalkan, dan tidak ada informasi yang boleh disembunyikan untuk mencegahnya menjadi informasi yang salah. Untuk analisis keberlanjutan, pengguna dapat membandingkan laporan keuangan untuk periode dan industri yang berbeda (Defitri, 2018).

Sejak tahun 2014 hingga 2018, BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Ciamis sebanyak lima kali secara konstan. Berdasarkan penilaian yang diberikan, hal tersebut mencerminkan bahwa LKPD di Kabupaten tersebut disusun sesuai dengan norma dan memiliki kontrol yang baik. Hal ini sejalan dengan temuan audit opini WTP nasional yang meningkat dari tahun ke tahun khususnya di tingkat kabupaten yang berdampak pada provinsi juga. Berikut merupakan tabel jumlah

kriteria opini yang diberikan oleh BPK kepada setiap instansi yang diaudit.

Tabel 1
 Hasil Opini Tingkat Provinsi

Tahun	Provinsi			
	WTP	WDP	TMP	TW
2014	76%	21%	3%	0%
2015	85%	15%	0%	0%
2016	91%	9%	0%	0%
2017	97%	3%	0%	0%
2018	94%	6%	0%	0%

Sumber: IHPS 1 Badan Pemeriksa Keuangan RI (2015-2019)

Tabel 2
 Hasil Opini Tingkat Kabupaten

Tahun	Kabupaten			
	WTP	WDP	TMP	TW
2014	41%	50%	8%	1%
2015	54%	38%	7%	1%
2016	66%	29%	5%	0%
2017	72%	24%	4%	0%
2018	79%	18%	3%	0%

Sumber: IHPS 1 Badan Pemeriksa Keuangan RI (2015-2019)

Laporan keuangan yang berkualitas, khususnya pada level pemerintah daerah terpengaruh oleh beberapa faktor. Pertama, yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi SDM, seperti yang didefinisikan oleh Mangkunegara (2012), mengacu pada kemampuan individu mengenai pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik pribadi seorang pekerja yang berdampak pada kinerja mereka. Penelitian Fakhri et al., (2021) mengungkapkan bahwa kompetensi SDM memengaruhi kualitas LKPD. Hal ini tidak sejalan dengan riset Philadelphia, Istiqomah Shinta et al., (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak mampu memengaruhi laporan

keuangan yang berkualitas di tingkat pemerintah daerah.

Pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) merupakan faktor kedua yang berpotensi memengaruhi kualitas LKPD. Menurut Sutabri (2014), TI diperlukan untuk menghasilkan data berkualitas tinggi selama pemrosesan, akuisisi, dan penyimpanan data. Agar dianggap berkualitas tinggi, informasi harus memenuhi kriteria seperti relevan, akurat, dan tepat waktu untuk menggariskan keputusan individu dan organisasi. Hasil penelitian yang dilangsungkan oleh Julita (2018) dan Wibowo & Darmanto (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan dari TI memengaruhi LKPD yang berkualitas. Hal ini kontra dengan temuan penelitian Tampubolon & Basid (2019) dan Harnoni (2016) yang menyimpulkan bahwa penggunaan TI tidak mampu memengaruhi laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tampubolon & Basid (2019) menjadi landasan penelitian kali ini. Pembedanya adalah pada objek penelitian yang digunakan terletak di wilayah DKI Jakarta, sedangkan objek riset ini terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Perbedaan lain, yaitu pada indikator kompetensi yang digunakan oleh Tampubolon & Basid (2019) berupa pengetahuan, kemampuan, dan kewajiban. Sedangkan, indikator kompetensi SDM pada riset ini, yaitu kemampuan, pengetahuan, dan etika yang berbasis pada pasal 1 ayat 10 di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 perihal ketenagakerjaan untuk melihat pendekatan yang berbeda. Variabel komitmen organisasi secara konsisten membuahkan hasil pada sejumlah

penelitian lain, maka tidak dimasukkan kembali dalam penelitian ini.

HIPOTESIS

Teori Stakeholder

Pada tahun 1963, instisusi dari Stanford Reseach menerapkan sebutan *stakeholder* secara perdana. Teori tersebut dikembangkan oleh Bapak teori pemangku kepentingan bernama Freeman. Mengacu pada Freeman (1984), *stakeholder* adalah pihak yang memengaruhi atau terpengaruh atas aktivitas dari badan maupun lembaga. Pihak yang dimaksud antara lain, pemegang saham, kreditor, klien, vendor, pemerintah, masyarakat, dan pekerja. Teori ini menggarisbawahi, tidak hanya pemegang saham yang memiliki kepentingan atas keberlangsungan pada organisasi, namun keberadaan pihak lain juga turut andil atas kepentingan dari organisasi tersebut.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan

Sesuai dengan pasal 1 ayat 10 di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 perihal ketenagakerjaan, kompetensi adalah pikulan yang diselesaikan setiap pribadi dengan komponen pengetahuan, kemampuan, dan mentalitas kerja orang yang berhubungan dengan sikap kerja keras sesuai asas hukum (UU No 13, 2003). Sedangkan Guy et al., (2002) menyatakan bahwa dalam menunjang penyelesaian tugas yang baik diperlukannya kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian.

Mengacu pada teori *stakeholder* yang memaparkan bahwa *stakeholder* sebagai pihak yang sanggup memengaruhi ataupun yang terpengaruh

oleh komunitas dan perorangan, menerangkan pada riset ini bahwa kompetensi SDM yang merupakan pegawai pemerintah daerah sebagai *stakeholder* yang mampu memberikan dampak pada kualitas LKPD. Ketika organisasi memperkerjakan personel yang kompeten maka menghasilkan kinerja yang unggul. Salah satu hasil yang dimaksud berupa kualitas dari laporan keuangan yang diterbitkan.

Penelitian Wahyuni et al., (2018) menetapkan bahwa kompetensi SDM dapat memengaruhi kualitas LKPD. Makna dari hasil riset tersebut, yaitu kualitas LKPD akan berkembang dengan tingkat tingginya kompetensi SDM yang dimiliki, sedangkan kualitas laporan akan menurun dengan tingkat kompetensi SDM yang lebih rendah.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD, maka hipotesis berbunyi:

H1: Kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara positif.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 merepresentasikan perihal sistem informasi keuangan daerah, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melebarkan jangkauan penggunaan TI demi memperteguh daya pengurusan keuangan daerah, dan memublikasikan keterangan tentang situasi keuangan di tingkat daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 56, 2005). Seiring perkembangan dan penggunaan TI yang semakin meluas, berbagai kalangan kini dapat mengakses dan

pegawai dapat mengontrol data keuangan daerah dengan cepat dan akurat. Kecepatan pemrosesan informasi adalah keuntungan lain dari penerapan TI. Menurut Harnoni (2016), sistem akuntansi pada pemerintah daerah menangani transaksi yang relatif besar serta kompleks. Kondisi ini akan membantu ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan.

TI didefinisikan oleh Mulyadi (2014) Mulyadi (2014), sebagai komputer yang berdiri sendiri dari *hardware* atau perangkat keras dan *software* atau perangkat lunak yang meliputi berbagai peralatan kantor elektronik, peralatan pabrik, dan telekomunikasi. TI mencakup basis data yang berfungsi guna mencadangkan semua laporan atau data secara terstruktur yang disinkronkan dengan setiap komputer karyawan di entitas serupa, Jaringan internet digunakan oleh pengguna untuk mengakses data dengan cepat dan memudahkan komunikasi antar divisi dalam suatu organisasi.

Penggunaan TI dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan menurut *stakeholder theory*. Beragam pihak dapat membuka, mengendalikan (berdasarkan kewenangan), serta memanfaatkan keterangan pada LKPD secara *realtime* dan menyeluruh berkat perkembangan TI yang pesat. Laporan keuangan berkualitas tinggi akan dihasilkan melalui pemanfaatan TI yang efektif dan bantuan personel dengan keahlian teknis.

Penelitian tentang pemanfaatan TI telah diselesaikan oleh Pratama & Yahya (2019), menyatakan bahwa pemanfaatan TI berdampak positif pada LKPD yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Darmanto (2019) sejalan

dengan hal ini. Keadaan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan dihasilkan dari penggunaan teknologi yang efektif dan efisien. Maka dari itu, pemanfaatannya sangat krusial guna membantu seseorang dalam mengurus bisnisnya.

Beralaskan eksplanasi di atas, guna mengetahui bagaimana hubungan antara pemanfaatan TI dengan laporan keuangan yang berkualitas pada level pemerintah daerah, maka hipotesis berbunyi:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara positif.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Komunitas dalam riset ini, yaitu dalam lingkungan pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Standar responden yang digunakan adalah jabatan tinggi dari masing-masing SKPD dan BPKD yang bersangkutan dengan pembukuan laporan keuangan. Antara lain, Ketua Subsie Bagian (KASUBAG) Keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, KASUBAG Keuangan Kecamatan, dan Ketua Bidang BPKD. Kriteria ini dipilih oleh peneliti karena posisi mereka berhubungan memiliki keterkaitan dengan proses pembuatan laporan keuangan daerah. Manajemen puncak atau kepala setiap divisi adalah pihak yang mengambil keputusan.

Metode Penghimpunan Data

Penelitian kuantitatif dilangsungkan dalam riset kali ini. Keterangan dari responden dikumpulkan

melalui angket yang diberikan kepada pegawai SPKD dan BPKD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dilakukan pembagian kuesioner sebanyak 117 untuk diisi. Kuesioner dibagikan di kantor BPKD pada sesi pertama, dan dikembalikan kepada peneliti pada waktu yang telah disepakati seminggu kemudian. Pada sesi kedua, kuesioner diberikan langsung ke kantor BPKD untuk beberapa pegawai yang sebelumnya tidak memperoleh kuesioner dan kepada responden SKPD pada saat pelatihan akuntansi yang mencakup seluruh SKPD.

Definisi dan Pengukuran terhadap Variabel

Skala Likert digunakan untuk mengetahui pendapat individu terhadap suatu situasi yang sedang terjadi. Ketika peneliti membuat perangkat instrumen sebagai alat ukur, berbagai indikator digunakan sebagai acuan. Kumpulan indikator ini berbentuk pernyataan atau kalimat. Arti dari tanggapan skala Likert pada setiap item instrument antara lain, sangat tidak setuju (Bernilai 1), tidak setuju (Bernilai 2), netral (Bernilai 3), setuju (Bernilai 4), dan sangat setuju (Bernilai 5).

Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah

Penelitian menetapkan kualitas LKPD selaku variabel dependen. Di tingkat pemerintah daerah, indikator laporan keuangan yang berkualitas antara lain persisten, amanah, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Implementasi Ningrum (2018) menjadi dasar langkah-langkah yang diambil. Ini termasuk kemampuan untuk menguji informasi keuangan yang disajikan, keterbandingan laporan keuangan, penyajian laporan

keuangan yang tepat pada waktunya, kelengkapan fakta dari laporan keuangan, keakuratan laporan yang disajikan, pelaksanaan transaksi yang jujur, dan kejelasan informasi.

Kompetensi pada Sumber Daya Manusia

Penelitian kali ini menggunakan kompetensi SDM sebagai variabel bebas. Kompetensi SDM mencakup beberapa indikator yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Penelitian ini mengadopsi Ningrum (2018) dalam penggunaan indikator pesbagai alat ukur kompetensi SDM. Instrumen yang digunakan meliputi pemahaman tentang metode dan mekanisme akuntansi; menyelami PP Nomor 71 Tahun 2010; kemampuan mencatat transaksi dalam jurnal; kapasitas untuk memposting ke buku besar; menyusun *statement of changes in equity, cashflow*, neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); dan bakat untuk pekerjaan etis

Pemanfaatan pada Teknologi Informasi

Penggunaan TI diterapkan sebagai variabel independen dalam riset ini. Dua parameter dalam pemanfaatan TI dibutuhkan dalam riset ini. Komputer dan jaringan internet merupakan komponen dari parameter tersebut. Penggunaan TI mencakup beberapa komponen dengan melakuka adopsi dari Ningrum (2018) yang meliputi penggunaan komputer dalam bertugas, proses akuntansi terkomputerisasi, perangkat lunak yang dimanfaatkan, sistem keamanan dan pemeliharaan komputer, serta pemakaian jaringan internet.

Persamaan yang diaplikasikan dalam riset kali ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y: Kualitas LKPD

X1: Kompetensi SDM

X2: Pemanfaatan TI

a : Konstanta

b1: Koefisien dari regresi X1

b2: Koefisien dari regresi X2

e : *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sebanyak 117 kuesioner dibagikan langsung kepada responden. Sebanyak 113 kuesioner memenuhi persyaratan untuk siap olah data. Roscoe (1982) mengatakan bahwa dalam regresi linier multivariat atau berganda, jumlah sampel dihitung dengan mengalikannya dengan sepuluh kali variabel yang diteliti. Riset ini menggunakan tiga faktor yang selanjutnya digandakan dengan 10, maka diperoleh 30 sampel. Studi ini memanfaatkan 113 sampel yang melampaui besaran minimum sampel yang dibutuhkan.

Jenis kelamin responden dapat dijelaskan dengan tabel berikut. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, terhitung 65% dari seluruh responden. Mayoritas responden berusia antara 36 dan 50 tahun. Sisi ini mengartikan tingkat penalaran responden yang luhur. Kemudian, mayoritas responden memegang gelar kesarjanaan. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup berpengetahuan dan terampil dalam pelaporan keuangan. Sementara, mayoritas responden memiliki jam terbang di atas 10 tahun, yang artinya

responden cukup berpengalaman dalam proses pembuatan laporan keuangan dan mampu beradaptasi ketika terjadi perubahan kebijakan. Mengenai jabatan atau kedudukan, secara mayoritas diungguli oleh bagian penerimaan di SKPD karena bagian SKPD lainnya tidak mengembalikan kuesioner dan beberapa kuesioner tidak lengkap. Tugas SKPD, yaitu mengelola keuangan BPKD berdasarkan kewenangan dari pemerintah, maka jabatan SKPD dan BPKD saling terkait. Oleh sebab itu, diperlukannya laporan konsolidasi yang di buat oleh SKPD dari beragam dinas, badan, serta kecamatan pada SKPD. Dengan demikian, responden pada studi ini telah memberikan sampel yang representatif dari populasi.

Tabel 3
 Hasil Rekapitulasi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	40	35%
	Perempuan	73	65%
	Total	113	100%
Umur Responden	< 20 tahun	13	12%
	20-35 tahun	30	27%
	36-50 tahun	49	43%
	> 50 tahun	21	19%
	Total	113	100%
Riwayat Pendidikan	D3	10	9%
	Sarjana	74	65%
	Magister	19	17%
	Doktor	0	0%
	SLTA / SMA	8	7%
	SMU	1	1%
	SMEA	1	1%
Jumlah	113	100%	
Jam Terbang	1-5 tahun	13	12%
	6-10 tahun	42	37%
	> 10 tahun	58	51%

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	%
	Jumlah	113	100%
Jabatan	KASUBAG Keuangan SKPD	27	24%
	Bagian Penerimaan SKPD	28	25%
	Bagian Pengeluaran SKPD	27	24%
	KASUBAG Keuangan Kecamatan	25	22%
	Ketua Bidang Akuntansi Laporan BPKD	1	1%
	Kasie Akuntansi BPKD	3	3%
	Staff BPKD	2	2%
Jumlah	113	100%	

Sumber: Data diolah, 2019

Uji Validitas

Jumlah sampel sebanyak 113 digunakan untuk menguji hasil analisis korelasi bivariat pada kolom korelasi untuk uji validitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi dalam. Data penelitian dimaknai valid ketika nilai r hitung di atas ambang batas nilai r tabel, begitu sebaliknya (Ghozali, 2013). Pada tes ini, r tabel untuk N=113 adalah 0,185. Dimulai variabel kualitas LKPD hingga kompetensi SDM dan penggunaan TI, setiap instrumen penelitian memiliki koefisien korelasi (r) yang lebih unggul dari tabel r (0.185). Oleh karena itu, segenap instrumen pada studi ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha, suatu uji statistik, digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu data. Menurut Sekaran & Bougie (2016), suatu variabel ditetapkan reliabel bilamana nilai *Cronbach's Alpha* lebih unggul dari 0.60. Data yang diolah mengantongi nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.877 untuk variabel kualitas LKPD, 0.644 untuk variabel kompetensi SDM, dan 0.806 untuk variabel pemanfaatan TI. Menurut Ghozali (2013), data dianggap reliabel jika *Cronbach's Alpha* lebih unggul dari 0.60. Semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.60 yang ditunjukkan dari hasil pengolahan data. Semua dalam semua informasi dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Tabel 4
 Hasil Pengolahan Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Rasio	<i>Cronbach's Alpha</i>
Y (Kualitas LKPD)	7	0.877
X1 (Kompetensi SDM)	6	0.644
X2 (Pemanfaatan TI)	6	0.806

Sumber: Data diolah, 2019

Uji Normalitas

Guna memahami apakah data yang dikonsumsi dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak normal, maka dilakukan uji normalitas. Uji kenormalan dalam eksplorasi ini beralaskan pada Ghozali (2013), mengemukakan bahwa *asympt. Sig (2-tailed)* lebih unggul dari 0.05 merupakan syarat keputusan bahwa data normal. Data yang diproses digunakan untuk menentukan nilai *asympt. Sig*. Studi ini

memiliki data distribusi normal karena *Sig (2-tailed)* bernilai 0.076 lebih besar dari 0.05.

Tabel 5
 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	113
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0.076

Sumber: Data diolah, 2019

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen desain regresi berkorelasi. Angka toleransi dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dikenakan dalam penelitian ini guna mengidentifikasi gejala multikolinearitas. Multikolinieritas tidak terdapat pada data jika angka *VIF* kurang dari 10, sedangkan multikolinearitas terdapat pada data jika angka *VIF* lebih besar dari 10 (Ghozali, 2013). Angka *VIF* dan angka toleransi untuk X1 (Kompetensi SDM) dan X2 (Pemanfaatan TI), masing-masing sebesar 1,358 dan 0,736. Semua nilai *tolerance* menunjukkan nilai yang melebihi batas 0.1 dan angka *VIF* tidak mencapai angka 10. Maka, disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Tabel 6
 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel yang Digunakan	<i>Tolerance</i>	VIF
X1 (Kompetensi SDM)	0.736	1.358
X2 (Pemanfaatan TI)	0.736	1.358

Sumber: Data diolah, 2019

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian memerlukan pengujian heteroskedastisitas demi menangkap apakah desain regresi penelitian menunjukkan kelaianan varian antar penglihatan. Menurut temuan tes, heteroskedastisitas hadir dalam kumpulan data jika angka probabilitas tidak mencapai *alpha* dan heteroskedastisitas tidak muncul jika angka probabilitas lebih besar dari 0.05 (Ghozali, 2013). Nilai signifikansi untuk setiap variabel yang tertera pada tabel 7 mendatangkan nilai yang lebih besar dari 0.05. Oleh karenanya, ditarik kesimpulan bahwa desain regresi yang diterapkan dalam studi ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel yang Digunakan	Nilai Sig.
Y (Kualitas LKPD)	0.940
X1 (Kompetensi SDM)	0.616
X2 (Pemanfaatan TI)	0.382

Sumber: Data diolah, 2019

Uji t

Pengujian t dibutuhkan guna mencermati apakah variabel bebas (X) mampu memengaruhi variabel terikat (Y) dengan gaya parsial. Landasan yang digunakan menganut dari Ghozali (2013), dilakukannya perbandingan antara angka probabilitas atau derajat kepercayaan dengan taraf 0.05. Penerimaan H₀ dan penolakan H_a dapat terealisasi jika angka probabilitas melampaui batas ambang 0,05, begitu pula sebaliknya. Hasil pengolahan data tercermin pada tabel di bawah yang menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima karena kedua variabel

independen memiliki angka probabilitas yang tidak melampaui 0.05.

Tabel 8
 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t- hitung	Sig.
Konstan	3.675	1.712	0.090
X1	0.225	2.034*	0.044
X2	0.944	12.359*	0.000

* : Tingkat signifikansi 0.05

Sumber: Data diolah, 2019

Penilaian kompetensi pegawai pemerintah daerah di dalam melaksanakan tanggungjawabnya seperti penyusunan laporan keuangan yang tercermin berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku pegawai dalam bertugas. Pengetahuan dan keahlian tercermin dari level pendidikan yang dimiliki pegawai SKPD dan BPKD, sementara perilaku pegawai dapat diperhatikan dengan memperhatikan posisi yang dipegang. Posisi atau jabatan adalah fondasi di mana seorang karyawan membagi tanggung jawab mereka. Melalui jabatan, karyawan akan memahami keterbatasan pekerjaannya sehingga dapat beretika dengan baik. Temuan studi menunjukkan bahwa LKPD yang berkualitas akan disorong dengan peningkatan kompetensi SDM secara konsisten.

Menurut pada teori pemangku kepentingan pada riset ini, suatu organisasi diharuskan menyampaikan laporan keuangan yang dipersiapkan oleh karyawan yang berpartisipasi dalam pelaporan keuangan untuk memberi manfaat bagi semua pemangku kepentingannya. Untuk melaksanakan

tanggung jawabnya, karyawan bertindak searah dengan aturan atau petunjuk proses pelaporan. Hal ini sesuai dengan temuan Wahyuni et al., (2018) dan Tampubolon & Basid (2019), yang mengklaim bahwa kompetensi SDM dapat memengaruhi LKPD yang berkualitas.

Pemanfaatan TI khususnya komputer dan jaringan internet dapat dievaluasi dalam beberapa hal. Pegawai di SKPD dan BPKD menunggangi komputer dalam rangka menuangkan informasi transaksi yang melahirkan laporan keuangan. Lebih lanjut, pekerja turut mengenakan jaringan internet untuk mendistribusikan laporan keuangan kepada masyarakat umum. Petugas pemerintah mengenakan komputer saat menyelesaikan tugas mereka dan menggunakan jaringan internet untuk bertukar data untuk mencapai administrasi yang baik. Menurut temuan survei, penggunaan TI akan berakibat pada keadaan LKPD, sehingga mewujudkan kualitas dari LKPD yang baik.

Menganut pengertian teori pemangku kepentingan pada riset ini, asosiasi harus mendapatkan keuntungan dari setiap mitranya dengan memberikan laporan keuangan, ditopang bersama faktor penggunaan TI yang kuat untuk data keuangan. Laporan yang dihasilkan mampu dimanfaatkan secara cepat dan efektif secara berkala oleh pekerja yang bersangkutan. Hal ini mendukung temuan Julita (2018) dan Wahyuni et al., (2018), bahwa penggunaan TI berkontribusi terhadap peningkatan dari kualitas laporan keuangan daerah supaya menjadi lebih baik.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Diperlukannya analisis Koefisien Determinasi (R^2) guna menganalisis bagaimana kapasitas variabel independen pada variabel dependen. Kemampuan variabel bebas (X) guna menandakan variasi variabel terikat (Y) juga rendah ketika nilai R^2 rendah, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2013). Angka *Adjusted R Square* pada tabel 9 adalah 0.687. Berdasarkan sampel dan variabel independen yang digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni variabel kompetensi SDM dan pemanfaatan TI mampu mengartikan variabel kualitas LKPD sebesar 68.7%, sedangkan sisanya sebesar 31.3% dijelaskan bersama variabel lain yang tidak termasuk dalam studi kali ini.

Tabel 9
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0.832	0.693	0.687

Sumber: Data diolah, 2019

KETERBATASAN PENELITIAN

Terdapat sejumlah kelemahan untuk melakukan penelitian, yang dapat berdampak pada hasil, antara lain responden memiliki kedudukan jabatan yang penting di dalam lingkup pemerintahan dengan kepadatan jadwal. Kondisi ini mengakibatkan diperolehnya beberapa angket pertanyaan yang tidak berbalik dan tidak direspon secara utuh. Oleh sebab itu, terdapat data yang tidak dapat diolah dan mengurangi jumlah sampel yang digunakan dikarenakan ketidaklengkapan data responden tersebut. Kemudian, penelitian ini belum mempertimbangkan variabel kontrol. Diharapkan riset selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel kontrol. Selain itu, ketidakkonsistenan dari studi terdahulu dengan studi saat ini

dikarenakan lokasi penelitian yang berbeda-beda. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden hingga pada lingkup nasional supaya mendapatkan hasil representative.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari studi empiris di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk memahami bagaimana pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan TI pada kualitas LKPD. *Feedback* responden pada penelitian yang telah dilakukan berupa kuesioner atas pertanyaan dan hipotesis yang dirumuskan. Kesimpulan dari riset ini, yaitu (1) Kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat terpengaruh secara signifikan dan positif oleh kompetensi SDM. Artinya, semakin tinggi tingkat kompetensi SDM akan semakin memberikan *output* berupa LKPD yang berkualitas; (2) Kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penggunaan TI. Artinya, semakin tinggi tingkat pemanfaatan TI akan mewujudkan LKPD yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2015-2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
<https://www.bpk.go.id/ihps>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 64–75.
- Fakhri, M., Indrawati, L., & Sembiring, E. E. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Survei pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 536–543.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
- Guy, D. M., Alderman, C. W., & Winter, A. J. (2002). *Auditing* (Sugiyarto (ed.); Kelima). Erlangga.
- Harnoni. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jom FEKON*, 3(1), 1079–1093.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.
http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/ED_KerangkaKonseptual_Web.pdf
- Julita, S. (2018). Analysis of Factor Affecting the Quality of Government Financial Report Bengkalis Regency. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(2), 157–164.
- Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. N. A. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 643–670.
- Mangkunegara, A. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi* (Keempat). Salemba Empat.
- Ningrum, K. K. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Pemerintah Nomor 56. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49722/pp-no-56-tahun-2005>
- Philadelphiah, Istiqomah Shinta, Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Pratama, R. R., & Yahya, M. R. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3),

520–531.

- Roscoe. (1982). *Research Methods For Business*. Mc Graw Hill.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Sholohah, S. A., & Sulistyawati, A. I. (2018). Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 13(2), 280–300.
- Sutabri. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi* (Pertama). ANDI.
- Suwarjono. (2014). *Teori Akuntansi* (Ketiga). BPFE-YOGYAKARTA.
- Tampubolon, F. M., & Basid, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55–65.
- UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 10. (2003). *UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 10 tentang Ketenagakerjaan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>
- Wahyuni, S., Fadah, I., & Tobing, D. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 66–80.
- Wibowo, A., & Darmanto, S. (2019). Improvement Quality of Financial Report Model by Good Governance, Utilization of Information Technology and Internal Control. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 10(4), 09–17.